

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan diberbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga perguruan tinggi. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 8 (2006) tentang kinerja instansi pemerintah, mendefinisikan kinerja sebagai suatu keluaran atau hasil dari program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pegawai merupakan gambaran untuk pencapaian atau hasil pelaksanaan kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dalam kurun waktu tertentu. Untuk meningkatkan kinerja diperlukan kerjasama yang kuat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Karena, semakin baik kinerja seorang pegawai akan berpengaruh dengan semakin baiknya organisasi tersebut.

Pemerintah memiliki beberapa lembaga yang bergerak dalam berbagai bidang. Dinas Perdagangan merupakan salah satu instansi yang mendapat tugas untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar. Setiap instansi berhak mengajukan usulan anggaran setiap tahun berdasarkan kebutuhan rutin dan pembangunan. Untuk menjaga agar pelayanan tersebut dapat tetap berlangsung diperlukan adanya penyusunan anggaran sebagai suatu proses pengalokasian dana kegiatan publik agar tetap sesuai dengan fungsinya. Secara garis besar anggaran dana publik dapat berupa informasi kondisi keuangan yang isinya meliputi pendapatan, belanja dan aktivitas yang dilakukan

instansi tersebut. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, realisasi pendapatan negara tahun 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp99.235.122.207 atau mencapai 108,66% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp91.325.016.000. Sedangkan Realisasi Belanja Negara Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.244.652.636.286 atau mencapai 93,32 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.477.064.284.000.

Realisasi anggaran ini justru menurun dari realisasi anggaran pada tahun 2019, yang mana Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 151.389.266.119 atau mencapai 129,44% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 116.958.056.000, atau menurun sebesar 20,78%. Dan Realisasi Belanja Negara Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.246.524.101.571 atau mencapai 89,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.643.998.969.000.

Pemerintah Kudus saat ini telah memperlihatkan berbagai kasus mengenai masalah hukum, diantaranya mengenai kepala daerah yang tersandung masalah hukum yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dalam otonomi daerah. Sepanjang tahun 2021, dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terdapat 3 kepala daerah yaitu mantan kepala desa Tergo, Lau, dan Undaan Tengah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyalahgunaan dana desa. KPK menyebutkan bahwa modus korupsi dilakukan dengan berbagai cara terutama terkait penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi, pengelolaan aset daerah dan lainnya.¹

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus tahun 2019 masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh dinas perdagangan. Pada tahun 2019 pendapatan retribusi terealisasi sebesar 59% (realisasi penerimaan pendapatan Rp 13.282.609.000 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp13.282.609.000) sedangkan pada tahun 2018 realisasi

¹Dian Utoro Aji, '3 Mantan Kades Di Kudus Diusut Soal Dugaan Korupsi Duit Miliaran Dana Desa', *Detik News*, 2021.

pendapatan retribusi yang dicapai adalah sebesar 66,59% (realisasi penerimaan pendapatan mencapai Rp7.155.530.796 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp10.745.609.000). Bila dibandingkan terdapat kenaikan realisasi sebesar 23,6% atau sebesar Rp681.428.596. Namun target retribusi pada tahun 2019 masih belum terserap penuh dan hanya mencapai 59%. Selain dari pendapatan retribusi, keterbatasan kualitas pegawai juga menjadi kendalanya.

Tabel 1.1
Tingkat pendidikan pegawai Dinas Perdagangan
Kabupaten Kudus

Pendidikan	Jumlah (Orang)
Strata 3 (S-3)	13
Strata 2 (S-2)	4
Strata 1 (S-1)	8
Diploma 3	2
SMA	62
SMP	31
SD	35

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 155 orang. Dari 155 orang tersebut terdapat 142 orang PNS dan PhD (S-3) sebanyak 13 orang. Dari 142 PNS ada 128 pegawai yang berlatar pendidikan SMA kebawah. Hal itu berakibat pada rendahnya penguasaan teknologi informasi terutama sistem informasi akuntansi sehingga kurang efektifnya mereka dalam melaksanakan pekerjaan serta tertundanya pelayanan publik meskipun sudah diberikan fasilitas komputer beserta perangkatnya.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa masih terdapat permasalahan terkait dengan kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari penyerapan aturan yang masih kurang memuaskan dan masih rendahnya kualitas dan kapasitas SDM pegawai yang masih banyak berpendidikan SMA ke bawah sehingga berdampak pada rendahnya penguasaan teknologi informasi

dan kurang efektifnya pekerjaan serta tertundanya pelayanan publik

Sebagai instansi pemerintah, dinas perdagangan dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas. Salah satunya mengenai laporan keuangannya.

Anggaran merupakan peran penting sebagai perencanaan dan kriteria kinerja. Anggaran dimaksudkan agar pemerintah mengetahui sebatas mana kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan tugasnya agar selaras dengan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam proses menyusun anggaran diperlukan aspek penting dalam pencapaian sebuah keberhasilan. Anggaran tidak hanya dijadikan sebagai sarana perencanaan dan pengendalian, tetapi juga dijadikan sebagai sarana untuk koordinasi, komunikasi, evaluasi kerja dan motivasi.²

Proses penyusunan suatu anggaran dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni *top down*, *bottom up*, dan *partisipatif*. Sistem penganggaran *top down* yang diterapkan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan atau pemegang kuasa sehingga pegawai biasa hanya menjalankan hasil keputusan saja. Penerapan sistem yang seperti ini akan menyebabkan kinerja dari pegawai biasa menjadi kurang efektif karena target yang dibebankan terlalu berat namun sumber daya yang diberikan kurang maksimal. Pegawai tingkat atasa kurang begitu mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh pegawai biasa sehingga memberikan target yang sangat berat jika dibandingkan dengan kemampuan.

Berbeda dengan sistem *bottom up* yaitu dalam proses pembuatan anggaran dilakukan secara bersama-sama antara pemegang kuasa dan pelaksana anggaran. Hal ini dapat dilakukan sebagai sarana yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi manajemen maka lembaga sektor publik

²Murtanto and winda arum Hapsari, 'Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran ', 6.17 (2017), 20–31.

menerapkan sistem penganggaran yang dapat menanggulangi masalah diatas, yaitu dengan menerapkan partisipasi anggaran (*participatory budgeting*). Melalui sistem ini, pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga tercapai kesepakatan antara pemegang kuasa anggaran dengan pelaksana anggaran.³

Anggaran dapat dijadikan sebagai alat penilaian kinerja, maksudnya adalah kinerja dapat dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan, mengkomunikasikan, memotivasi dan mengevaluasi prestasi pemegang kuasa yang akan memainkan peranan dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari tujuan anggaran, dimana anggaran senantiasa digunakan sebagai tolok ukur kinerja pemegang kuasa. Dalam proses penyusunan anggaran, sebaiknya semua tingkatan manajemen ikut berpartisipasi (terlibat). Partisipasi dalam penyusunan anggaran melibatkan sumber daya manusia yang ada dalam instansi atau organisasi tersebut.

Kinerja pegawai juga dapat dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau (SIA) adalah sekumpulan dari informasi keuangan yang dihasilkan lewat pengolahan suatu transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sistem yang baik akan dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal terutama dalam proses pengambilan keputusan. Baik atau tidaknya kualitas sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari, mudah digunakan, akses yang cepat, handal, fleksibel, dan aman dalam melindungi data pengguna maka pengguna sistem akan puas.⁴

Sistem informasi akuntansi tidak hanya mengelola sistem keuangan namun data non keuangan juga dapat diolah sebab

³Murtanto and Winda Arum Hapsari, 'Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Dan Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Moderating', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Universitas Trisakti*, 8.1 (2006), 20–31.

⁴Ni Made Ayu Ari Kasandra and Gede Juliarsa, 'Pengaruh Kualitas Penerapan Sia, Pemanfaatan Dan Kepercayaan Teknologi Informasi Pada Kinerja Karyawan', *E-Jurnal Akuntansi*, 14.1 (2016), 539–47 <<https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11420/11857>>.

penetapan keputusan tidak bisa hanya diambil dari data keuangan, tetapi data non keuangan suatu kondisi dan keadaan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan. Pada dasarnya, sistem informasi akuntansi mempunyai peran yang penting dalam kinerja pegawai. Menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya yang bisa digunakan sebagai informasi dan acuan untuk mengambil keputusan merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dari pandangan akuntansi.⁵

Secara umum motivasi berkaitan dengan upaya menuju setiap tujuan organisasi maupun instansi. Motivasi erat hubungannya dengan timbulnya suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Motivasi timbul karena adanya suatu kebutuhan dan karenanya kebutuhan tersebut terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu.

Betapa pentingnya motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan, maka hendaknya pihak perusahaan maupun instansi memberikan motivasi kepada setiap pegawai demi tercapainya tujuan bersama. Pemberian motivasi sangat baik dilakukan oleh pihak perusahaan agar para pegawai dapat terdorong untuk menghasilkan kerja yang maksimal sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh atasan dapat dikerjakan dengan lancar.

Motivasi perlu didorong dan ditingkatkan agar pegawai dapat melaksanakan kinerja dengan baik, namun bila pegawai tidak mendapat motivasi yang baik, maka cenderung sulit bekerja dengan maksimal dan tidak bertanggung jawab, dengan adanya motivasi kerja yang tinggi maka pencapaian produktivitas yang maksimal juga mudah diperoleh. Motivasi dapat didorong dan ditingkatkan oleh instansi agar meningkatkan kinerja pegawainya. Semakin banyak faktor kerja yang mempengaruhi motivasi terpenuhi, semakin tinggi pula kinerja pegawai tersebut.

⁵I Kadek Agastia Maha Putra and I Made Pande Dwiana Putra, 'Pengaruh Efektivitas Penggunaan, Kepercayaan, Keahlian Pengguna, Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17.2 (2016), 1516–45.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak yang membahas tentang pengaruh partisipasi anggaran dan penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ayu Ari Kasandra dan Gede Juliarsa (2016) dengan judul Pengaruh Kualitas Penerapan SIA, Pemanfaatan dan Kepercayaan Teknologi Informasi pada Kinerja Karyawan. Hasil penelitian dari faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan pada kinerja karyawan di Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa antara kualitas penerapan SIA, pemanfaatan teknologi informasi dan kepercayaan teknologi memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi atau instansi. Semakin baik sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka semakin meningkat kinerja individu dalam organisasi tersebut. Begitu juga dengan terjalinnya hubungan yang baik antara kepercayaan teknologi informasi pada kinerja karyawan membuat kinerja dari individu semakin lebih baik dan ketersediaan teknologi menjadi salah satu faktor penentu peningkatan kinerja.⁶

Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soudani (2017) yang menunjukkan bahwa tidak mendukung adanya hubungan positif antara Sistem Informasi Akuntansi pada kinerja pegawai.⁷ Soudani menyatakan bahwa sistem informasi yang efektif merupakan suatu sistem yang dapat nilai tambah kepada perusahaan

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lilis Setyowati dan Purwantoro (2013), dengan judul Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dan Kepuasan Kerja pada Pemerintah Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti sering tidaknya berpartisipasi dalam penyusunan anggaran tidak mempengaruhi baik

⁶Kasandra and Juliarsa.

⁷Alvin Nikmah, 'Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Baitul Muamalat Al Hikmah Di Kabupaten Blora' (IAIN Surakarta, 2020).

buruknya kinerja manajerial. Partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini berarti tinggi rendahnya kepuasan kerja tidak dipengaruhi oleh sering tidaknya ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.⁸

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Maulana, Henri Agustin, Mayar Afriyenti (2017), Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan positif antara partisipasi anggaran dan kinerja manajemen. Hal itu dikarenakan pegawai SKPD Pesisir Selatan memang ikut serta dalam proses penganggaran, akan tetapi keikutsertaan pegawai tersebut sebatas ikut dalam perencanaan karena merupakan kewajiban untuk ikut serta, namun kepesertaan tersebut tidak dapat diwujudkan dengan menggunakan ide maupun usulan atau kreativitas pegawai SKPD Pesisir Selatan yang terlibat penuh dalam anggaran. Sedangkan Motivasi kerja tidak dapat mengurangi dampak partisipasi anggaran terhadap kinerja manajemen, karena karyawan SKPD memiliki motivasi yang berbeda dengan kondisi kerja karyawan perusahaan swasta. Pekerjaan pegawai SKPD sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Di perusahaan swasta, karyawan mengejar anggaran karena mengejar prestasi kerja. Di lingkungan SKPD, kinerja pegawai ditentukan oleh regulasi.⁹

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa hasil temuan mereka tidak konsisten antara satu dengan lainnya. Pengaruh antara partisipasi anggaran, sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan ada kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang bertindak sebagai variabel intervening atau moderating. Dengan kata lain untuk menyelesaikan perbedaan

⁸Lilis Setyowati and Purwanto, 'Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dan Kepuasan Kerja Pada Pemerintah Kota Semarang', *Media Ekonomi & Teknologi Informasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.*, 21.2 (2013), 66–79.

⁹Iqbal Maulana, Henri Agustin, and Mayar Afriyenti, 'Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Skpd Kabupaten Pati)', *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6.2 (2017), 141 <<https://doi.org/10.30659/jai.6.2.141-156>>.

dari hasil penelitian tersebut, bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontijensi yang secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi pengaruh antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja karyawan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, penelitian ini akan menguji apakah variabel motivasi kerja yang berfungsi sebagai variabel moderasi dapat memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dan penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus mengingat realisasi pendapatan retribusi pada tahun 2019 yang menurun dari tahun 2018 sebesar 23,6%. Penurunan tersebut dimungkinkan karena kurangnya motivasi kerja dan partisipasi dari pegawai dalam melaksanakan kinerjanya. Menyadari bahwa masih terdapat masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu ditingkatkannya motivasi kerja kepada para pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus untuk lebih memperbaiki kinerjanya dengan lebih efektif agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta dapat lebih melek terhadap teknologi informasi.

Berdasarkan dari uraian diatas, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KUDUS”.

B. Rumusah Masalah

Dalam menilai pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran dan penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pegawai?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai?
3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja pegawai?
4. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap hubungan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal berikut:

1. Menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pegawai
2. Menganalisis pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai
3. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja pegawai
4. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap hubungan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan akan pengaruh partisipasi anggaran dan kegunaan sistem informasi akuntansi Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel moderasi serta dapat memberikan landasan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Perdagangan

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan sumber informasi dan sebagai bahan evaluasi serta acuan untuk meningkatkan kinerja pegawainya.

b. Bagi IAIN Kudus

Diharapkan bisa memberi sumbangan pengetahuan tentang pengaruh partisipasi anggaran dan penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis, maka penulisan penelitian dalam skripsi ini akan membagi menjadi lima bab dan setiap

bab terdiri dari sub-bab yang mengurai isi bab, yang mana antara bab I sampai bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis pendekatan dan setting penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Analisis Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian, gambaran umum objek penelitian, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dengan variabel moderating dan pembahasan.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.